

DEMAGOGI DAN KEKERASAN AGAMA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Masnun Tahir
Institut Agama Islam Negeri Mataram
masnun_tahir@gmail.com

Abstract

Democracy in Indonesia does not emerge political behavior but on the contrary it appears political ignorance that disregards moral sides of politics. Religion that should be a base for political ethics is only more performed as symbolic. Finally, politician be a demagogy, who sowed religious values that are not conducted. This attitude on the top side caused social frustration and spread violence on behalf of religion. This case is caused by regarding of radical group that the rulers have insulted religion, and because of that, they proper to toppled by any manner. With the result that democratic portrait yielded violence that caused by politician's performing and a short answer given by radical group. Thus, system of democracy in Indonesia becomes damage and need to reorganize.

Abstrak

Demokrasi Indonesia tidak menimbulkan perubahan perilaku politik tetapi sebaliknya memunculkan sikap acuh politik yang mengabaikan sisi-sisi moral politik. Agama yang seharusnya menjadi landasan etik politik lebih banyak ditampilkan secara simbolik. Politisi akhirnya menjadi demagog, menaburkan nilai-nilai agama yang tidak diamalkan. Sikap seperti ini pada ujungnya menimbulkan kefrustasian sosial dan menyemai kekerasan atas nama agama. Hal ini disebabkan oleh anggapan kelompok radikal bahwa para penguasa telah melecehkan

agama dan layak dijatuhkan dalam cara apapun. Walhasil potret demokrasi menghasilkan kekerasan akibat tampilan politisi dan jawaban singkat yang diberikan kelompok radikal. Dengan demikian, sistem demokrasi Indonesia menjadi rusak dan perlu penataan ulang.

Kata Kunci : Demokrasi, Demagogi, Kekerasan Agama,

A. Pendahuluan

Secara literal, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “*demos*” (rakyat) yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratos*” atau “*cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, “*demos-cratein*” atau “*demos-cratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹

Secara terminologis, demokrasi, menurut Joseph A. Schmitter, merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suatu rakyat. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sedangkan menurut Philippe C Schmitter dan Terry Lynn Karl, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dari para wakil mereka yang terpilih.²

Beberapa pengertian demokrasi yang diajukan di atas cukup untuk memberikan gambaran bahwa demokrasi pada intinya memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada rakyat untuk

¹ Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 71. Lihat juga Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesi: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 50.

² A. Ubaidillah dkk., *Pendidikan Kewargaaa: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), h. 162.

menentukan jalan pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih secara langsung.

Dewasa ini terjadi kecenderungan global di mana demokrasi tidak sekedar menjadi wacana intelektual (*intellectual discourse*), melainkan juga “impian” (obsesi) politik berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Berakhirnya Perang Dingin (*Cold War*) antara negara-negara adidaya (Amerika Serikat dan Uni Soviet) memiliki dampak positif bagi semaraknya gagasan dan proses demokratisasi di berbagai negara.³ Salah satu faktor penting yang menyebabkan demokrasi kini menjadi obsesi politik dunia adalah runtuhnya rezim-rezim komunis totaliter seperti Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Keruntuhan rezim-rezim tersebut menimbulkan kesan bahwa demokrasi merupakan senjata ampuh untuk melawan otoritarianisme dan totalitarianisme serta sistem anti demokrasi lainnya.⁴

Orang banyak berharap dari demokrasi. Dengan demokrasi diharapkan keputusan-keputusan yang menentukan kehidupan kolektif akan didasarkan pada pertimbangan publik yang luas. Masyarakat yang demokrasi akan mengurangi ketidakadilan dan membuat pengorganisasian kehidupan kolektif menjadi lebih rasional. Selain itu, demokrasi sering dianggap akan melindungi kebebasan warga serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Demokrasi selalu diidentikkan dengan kebebasan, hormat terhadap martabat manusia, kesamaan, keadilan, keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Demokrasi dipandang sebagai pengorganisasian masyarakat yang paling mencerminkan kehendak bersama karena tekanan partisipasi, representasi dan akuntabilitas.⁵

Demokrasi sebagai suatu konsep yang oleh Giovanni Satori dikatakan telah mendunia seratus persen merupakan produk Barat. Konsep demokrasi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai, pandangan

³Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 295.

⁴ *Ibid.*, h. 296.

⁵ Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003), h. 91.

dan cara hidup Barat, misalnya individualisme, kapitalisme, dan liberalisme. Karena itu, ketika demokrasi diadopsi oleh negara-negara non-Barat yang secara kultural dan ideologis berbeda dengan Barat untuk diterapkan sebagai sistem dan tatanan politik, maka ia seringkali menimbulkan permasalahan.⁶

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab konsep ini memiliki banyak konotasi makna yang bervariasi, evolutif dan dinamis. Demokrasi bermakna variatif, karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktik politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi parlementer dan lain-lain.⁷

William Ebenstein mengemukakan beberapa kriteria dan dasar psikologis demokrasi. *Pertama*, empirisme rasional. Konsep ini merujuk pada keyakinan bahwa akal sehat, akal budi (*reason*) atau nalar manusia sangat penting dijadikan dasar demokrasi. *Kedua*, kepentingan individu sangat diutamakan, ini merupakan kriteria terpenting. Kriteria inilah yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan demokratis tidaknya suatu sistem pemerintahan. *Ketiga*, teori instrumental tentang negara, menurut Ebenstein negara pada dasarnya bersifat instrumental. Negara, seperti yang dirumuskan Plato dan Aristoteles hingga Marx, tidak lebih dari sekedar alat politik untuk mencapai tujuan bersama manusia. *Keempat*, prinsip *volunteerism* atau prinsip kesukarelaan. Dalam sebuah negara demokratis, aksi-aksi atau kegiatan sosial politik haruslah didasarkan pada prinsip ini. Pada dasarnya negara demokrasi tidak mengenal mobilisasi paksa. *Kelima*, konsep hukum di balik hukum, hubungan antara negara dan masyarakat diatur oleh hukum dan kedudukannya lebih tinggi dari hukum negara. *Keenam*, pementingan cara atau prosedur dalam kehidupan demokratis

⁶ A. Ubaidillah dkk., *Pendidikan Kewargaan*, h. 192.

⁷ *Ibid.* Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik*, h. 297.

didasarkan pada kesadaran bahwa tujuan tidak dapat dipisahkan dari cara atau alat yang digunakan. *Ketujuh*, musyawarah dan mufakat. Dan *kedelapan*, persamaan hak asasi manusia.⁸

Larry Diamond menggambarkan lebih rinci kriteria demokrasi dalam sistem pemerintahan. *Pertama*, adanya kompetisi antar-individu dan kelompok (terutama partai-partai politik) yang meluas dan bermakna serta tidak menggunakan daya paksa untuk memperebutkan jabatan-jabatan pemerintahan regular. *Kedua*, adanya partisipasi politik yang tinggi dalam memilih pemimpin dan kebijakan-kebijakan minimal melalui pemilihan yang *fair* dan berkala serta tidak ada kelompok tertentu yang dikucilkan atau dikecualikan. *Ketiga*, adanya kebebasan sipil dan politik, antara lain: kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan berserikat yang cukup menjamin integrasi kompetisi dan partisipasi politik.⁹

Hal yang perlu diingat dari konsep demokrasi adalah ia tidak bersifat statis; ia merupakan hasil dari *power sharing* yang mencerminkan tingkat keseimbangan antara dua pihak yang melakukan tarik-menarik, yakni rakyat dengan kesadaran partisipasi dan penguasa dengan kesadaran otoritasnya. Bagian tengah (*moderasi*) dari *power sharing* itulah letak di mana demokrasi berada. Apabila kesadaran peran-serta rakyat terlalu dominan, maka yang terjadi adalah anarki. Sebaliknya, apabila penguasa berada pada posisi dominan, maka yang terjadi adalah otoritarian. Demokrasi yang diiringi dengan destabilisasi anarki tak jarang akan menimbulkan sikap brutal bahkan pembunuhan, atau jatuh bangunnya pemerintahan akibat mosi tidak percaya atau kudeta konstitusional.¹⁰

B. Wajah Demokrasi di Indonesia

Proses demokratisasi di Indonesia terjadi sejak tumbangnya rezim Orde Baru. Akan tetapi, peninggalan masa Orde Baru cukup

⁸ Suhelmi, *Pemikiran*, h. 304-308.

⁹ Mohtar Masoed, *Negara Kapital dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991), h. 12.

¹⁰ Muhajir Efendi, *Masyarakat Equilibrium* (Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002), h. 21.

memberikan beban kepada pemerintahan setelahnya, bahkan hingga saat ini dapat dikatakan bahwa tumbangnya rezim Orde Baru tidak sampai hingga ke akar-akarnya sehingga menyisakan permasalahan dan menyisakan oknum-oknum yang masih cukup intens dalam pemerintahan pasca-Orde Baru.

Ketika berbicara tentang masa transisi di Indonesia, hal awal yang terbersit dalam pikiran kita adalah masa di mana negara ini mengalami perubahan yang dulu dipercaya oleh masyarakat akan membawa kita kepada pembangunan yang lebih baik. Masa itu adalah masa di mana Rezim Orde Baru ditumbangkan setelah sekian lama menduduki pemerintahan di Indonesia dan digantikan dengan pemerintahan Reformasi. Kehadiran era transisi tersebut merupakan hasil pertemuan dua keadaan pada satu titik, yaitu ujung batas kulminasi kekecewaan terhadap Orde Baru serta momentum tepat untuk menumpahkan energi resistensi yang ada.¹¹

Untuk segelintir politisi, masa transisi ini sangat menguntungkan. Namun bagi mereka yang ingin melihat kepentingan lebih besar bagi masa depan bangsa dan negara secara keseluruhan, masa transisi yang berlama-lama ini sangat merisaukan.¹² Lamanya masa transisi di Indonesia akan menimbulkan mosi tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani berbagai permasalahan yang ada, baik dalam skala nasional maupun internasional. Transisi demokrasi di Indonesia dapat dikatakan masih berjalan secara prosedural. Dengan bahasa lain, apabila dilihat secara prosedural, pemerintahan yang berjalan di Indonesia sudah dapat dikatakan demokratis. Namun secara substansial, demokrasi di Indonesia masih berjalan timpang atau belum mencapai demokrasi secara utuh.

Terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam era transisi demokrasi. Kemungkinan *pertama* adalah demokrasi akan terwujud secara sempurna baik secara prosedural maupun

¹¹ Munafrizal Manan, *Gerakan Rakyat Melawan Elite* (Yogyakarta: Resist Book, 2005), h. 39.

¹² Ahmad Syafi'i Ma'arif, "Politik: Masa Transisi Harus Segere Diakhiri", dalam *Jurnal Inovasi*, No. 2 Th. XIII 2004, h. 96.

substansial. *Kedua*, perubahan dari otoritarianisme menjadi demokrasi tersebut mengalami stagnasi demokrasi, dan yang terjadi adalah masa transisi demokrasi yang berhenti di tengah-tengah atau tidak berkelanjutan. *Ketiga*, kembalinya demokrasi menjadi authoritarianisme karena mosi tidak percaya yang berkepanjangan terhadap demokrasi dan alasan lainnya.

C. Manipulasi Demokrasi: Munculnya Kekerasan

Manipulasi secara tidak langsung dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan. Dengan menggunakan strategi mengurangi kebebasan agar para pendengar atau pembaca tidak mendiskusikan atau melawan apa yang diusulkan, manipulasi masuk ke pikiran seseorang untuk meletakkan opini atau membangkitkan perilaku tanpa diketahui orang tersebut bahwa ada pelanggaran. Keberhasilan manipulasi terletak dalam strategi diamnya dan penyembunyian maksud sesungguhnya. Manipulasi dapat juga dikatakan sebagai kebohongan yang terorganisir secara rapi, dan alat untuk mengalahkan resistensi. Dalam manipulasi, medialah yang memiliki peran signifikan.

Seorang politisi cenderung bersembunyi di balik kalimat-kalimat kabur, kata-kata yang tidak pasti, untuk menghindari tuntutan penerapannya. Jacques Ellul mengungkapkan bahwa “informasi adalah sarana propaganda”. Dengan informasi, pencitraan dibangun. Pencitraan dibuat sesuai dengan aturan demagogi, yaitu menyesuaikan diri dengan yang diharapkan atau ingin didengar pemirsa. Realitas dikesampingkan untuk mempermainkan perasaan dan pikiran pendengarnya.¹³

Aktor dalam hal ini disebut dengan demagog, yaitu orang yang meminjatkan suaranya kepada rakyat. Ia adalah prototipe perayu massa. Orang yang berkecimpung dalam dunia politik (politikus) cenderung menjadi demagog. Ia bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang paling membingungkan dengan menampilkan wajah sebanyak kategori sosial rakyatnya. Ia bisa menunjukkan berbagai peran sehingga membuat tindakannya efektif di dalam situasi yang

¹³ Lihat [www.mirifica.net / wmview](http://www.mirifica.net/wmview). Diakses pada 1 Februari 2007.

beragam. Demagog akan meyakinkan kepada pendengarnya bahwa ia berpikir dan merasakan seperti apa yang mereka rasakan. Ia tidak akan menegaskan pendapat pribadinya, tetapi pernyataannya mengalir bersama dengan pendapat pendengarnya. Oleh karena itu, demagogi mengandaikan kelenturan wacana. Kelenturan ini dibangun melalui khazanah politik yang ambigu supaya kata yang sama bisa ditafsirkan sesuai dengan harapan pendengarnya.¹⁴

Demagogi sangat efektif untuk menggalang dukungan politik dari khalayak karena demagogi mempunyai mekanisme yang khas, antara lain: (1) Seorang *demagogue* selalu mencari kambing hitam atas segala masalah, sehingga kebencian terhadap suatu kelompok tertentu ditumbuhkan, dipelihara bahkan diperdagang identitasnya; (2) Argumen yang menjadi senjata dalam demagogi biasanya *ad hominem* (menyerang pribadi orang) dan argumen kepemilikan kelas yang penuh kebencian; (3) Seorang *demagogue* lihai membuat skematisasi dengan menyederhanakan gagasan atau pemikiran agar bisa memiliki efektivitas sosial sehingga menjadi sebuah opini dan keyakinan. Demagogi inilah yang kemudian memunculkan wacana kebencian terhadap pihak-pihak tertentu.¹⁵

Kebencian dapat menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan. Munculnya kebencian masyarakat terhadap kelompok atau golongan tertentu akan mengakibatkan munculnya kekerasan massal. Yang bermain kemudian bukan lagi moral bagi orang yang membenci golongan tertentu, melainkan egoisme kelompok maupun pribadi yang diliputi rasa dendam dan penuh kebencian.¹⁶

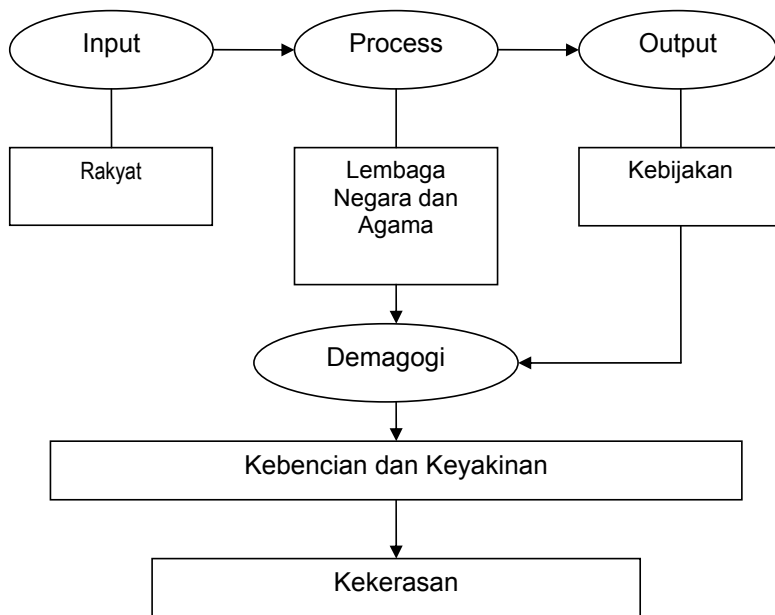
Penulis mencoba untuk memetakan demokrasi apabila disandingkan dengan demagogi sebagai berikut:

¹⁴ Haryatmoko, *Etika Politik*, h. 112.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, h. 111-112.

Tabel 1. Demokrasi VS Demagogi.



Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa demagogi yang memunculkan opini publik, sehingga menumbuhkan rasa kebencian dan keyakinan menjadi salah satu sumber terjadinya kekerasan. Manipulasi wacana dalam demagogi acapkali dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.

Wacana yang dikembangkan oleh para *demagogue* dapat juga berasal dari agama. Kebencian yang dimunculkan dari agama ini lebih sulit untuk diredam, dari pada kebencian yang disebabkan oleh aspek lain. Hal ini terjadi karena agama memberikan landasan ideologis dan pembenaran simbolis. Mereka merasa membela iman dan kebenaran. Dan dalam perspektif sejarah, kebencian tersebut bisa berasal dari kebencian yang ada pada masa lalu.¹⁷

D. Fenomena Manipulasi dan Demagogi di Indonesia

Manipulasi dan demagogi seolah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan politik masyarakat Indonesia. Manipulasi seolah tidak menjadi hal yang tabu lagi. Manipulasi bahkan dilakukan

¹⁷ Haryatmoko, *Etika*, h. 113-114.

secara terorganisir dari orang-orang yang ingin meraup keuntungan, meraih kekuasaan, ataupun melanggengkan kursi jabatan. Fenomena manipulasi banyak kita jumpai di berbagai lembaga pemerintahan.

Untuk menilik beberapa kasus, dalam pembahasan ini penulis menawarkan dua aspek yang seringkali menjadikan timbulnya demagogi, kebencian, dan pada akhirnya akan berujung pada kekerasan. Dua aspek tersebut adalah aspek sosial dan agama.

1. Aspek Sosial

Kasus pertama yang diajukan dalam tulisan ini adalah pidato Presiden RI pada 17 Agustus 2006 yang membicarakan tentang penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Data yang digunakan pada pidato tersebut adalah data survei bulan Februari 2005. Selain itu disinyalir terdapat intervensi staf ahli menteri terhadap Badan Pusat Statistik agar menahan data terbaru memperluas jumlah pengkritik. Manipulasi data dengan angka-angka yang seolah “turun dari langit” tersebut menjadikan keresahan tersendiri. Satu sisi, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pada waktu itu dirugikan karena kritikan yang beruntun datang kepadanya. Dalam hal ini peran media cukup tinggi.

Akibat dari penggunaan data-data empiris yang telah dimanipulasi dan ketidak-akuratan dalam menyuguhkan data-data tersebut, pemerintah sendiri yang akhirnya menanggung bumerang. Banyak pihak yang semestinya bertanggung jawab terhadap persoalan data-data tersebut. Akan tetapi karena kesalahan yang dilakukan bersifat teknis dan tidak sampai kepada tindakan korupsi atau tindakan lain yang tergolong pelanggaran hukum berat, maka permasalahan ini kemudian memunculkan *excuse* (pemaafan diri). *Excuse* terkadang diterima dalam bentuk yang sudah dimodifikasi. Salah satu bentuknya adalah pejabat yang bersangkutan menyatakan bahwa siapa pun akan melakukan kesalahan yang berbeda untuk menyebabkan hasil yang membawa kerugian. Dengan demikian, *excuse* digunakan untuk menunjukkan bahwa tindakan pejabat itu salah, namun bukan merupakan suatu sebab dari sebuah hasil.¹⁸

¹⁸ Dennis F. Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), h. 64.

2. Aspek Agama

a. Kasus bom yang meledak di beberapa tempat:

Kasus peledakan bom di beberapa tempat di Indonesia merupakan salah satu akibat dari demagogi. Dalam hal ini demagogi tersebut dilakukan oleh para pemuka agama, pengkhotbah, maupun guru agama yang menebarkan wacana permusuhan sehingga menimbulkan kebencian terhadap agama atau keyakinan lain. Para pengkhotbah maupun pemuka agama tersebut biasanya menggunakan doktrin agama sebagai legitimasi penuh atas wacana yang mereka ajarkan ke masyarakat. Kalangan yang biasa melakukan hal ini adalah orang-orang dari golongan fundamentalis agama.

Wacana permusuhan menurut pandangan mereka terdapat doktrin ajarannya. Mereka yang bertindak kekerasan itu seolah menganggap dirinya sebagai “prajurit Tuhan” di muka bumi, yang harus memerangi segala sesuatu yang dianggap tidak baik atau tidak sesuai dengan doktrin yang mereka anut.

Tindakan kekerasan yang mereka lakukan dipandang sesuai dengan koridor agama dan oleh karenanya wajib dilakukan. Bahkan pada beberapa kalangan di antara mereka memandang bahwa, doktrin kekerasan tersebut bersifat suci dan mereka merasa berdosa apabila tidak dilaksanakan.

b. Putupan Gereja di Bandung

Maraknya penutupan gereja pada tahun 2005 yang dilakukan pihak-pihak yang mengatasnamakan suatu aliansi masyarakat, telah membuat kegelisahan tersendiri bagi sebagian kalangan. Kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan melakukan aksi penutupan bahkan penyerangan tempat ibadah ini, kemudian menggugah negara untuk merevisi kembali SKB Menteri Nomor 1 Tahun 1969 yang dianggap telah menyalahi salah satu pasal dalam UUD 1945 (pasal 29). Pasal tersebut memberikan jaminan bagi warga negara untuk menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Hasil dari revisi tersebut adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan

Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Namun, persoalan tidak berhenti dengan adanya revisi. Sebab, muncul permasalahan baru yang sampai saat ini menjadi polemik bagi kaum minoritas agama dalam peraturan yang telah dibuat tersebut. Ini menandakan bahwa bagaimanapun manipulasi wacana yang dilakukan oleh kalangan tertentu selalu menyisakan permasalahan, yang terkadang tidak ditemukan pemecahannya.

c. Kekerasan atas Nama Agama

Kekerasan atas nama agama bisa mengambil bentuk pertarungan paham dan ideologi, konflik interen agama dan antar-agama, politisasi agama, konflik internal organisasi dan antar-organisasi keagamaan.¹⁹

Di penghujung tahun 2007, sejarah hubungan umat beragama masih mencatat adanya gesekan yang berujung pada kekerasan. Ironisnya, konflik antar-agama yang terjadi di negeri ini tidak lagi terjadi antar-agama, melainkan terjadi juga dalam internal agama. Salah satu contoh adalah pengusiran dan perusakan rumah tinggal dan tempat ibadah warga Ahmadiyah di Bogor, Bandung maupun Lombok NTB beberapa waktu lalu. Dampak dari kejadian itu, hingga kini masih dirasakan oleh warga yang mengaku “pengikut Mirza Gulam Ahmad” ini. Dalam pengamatan penulis ketika mengunjungi pengungsian mereka, banyak keluarga mereka yang kini terpaksa harus kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian dan semua ketentraman yang mereka bangun selama ini. Anak-anak mereka kini tak lagi bisa sekolah. Istri-istri mereka tak leluasa lagi pergi ke tempat-tempat umum, seperti pasar.

Agama yang sejatinya diharapkan mampu menjadi pengayom, pemberi rasa aman, penebar kedamaian di bumi, kini justru berubah menjadi api pemantik kebencian dan permusuhan di kalangan penganutnya. Friedrich Nietzsche, salah seorang pembaharu filsafat teologi yang paling terkemuka akhir abad ke

¹⁹ Penjelasan lengkap tentang potret kekerasan atas nama agama yang diakibatkan oleh adanya politisasi dan misinterpretasi agama, lihat Ahmad Suaedy dkk., *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

sembilan belas, melihat ada realitas yang mengerikan tentang apa yang disebut “agama” pada masanya. Kancah perang dan peran sebagai media untuk saling membenci banyak diprakarsai oleh operasionalisasi agama. Agama tidak hadir sebagai sosok humanis dan menghargai kehidupan manusia. Nietzsche mengambil kesimpulan bahwa kesadaran historis yang plagiatiflah yang tertinggal dalam agama dan diimani jutaan orang. Selebihnya tidak ada. Agama telah berkarat. *Gott ist tot*, “Tuhan telah mati”, kata-kata yang paling populer darinya ketika memaknai gejala eksploitatif, holokos dan misoginis yang diperankan agama.

G. Penutup

Demokrasi seharusnya tidak hanya diterapkan dalam bidang politik, melainkan harus di semua aspek kehidupan. Akan tetapi sangat disayangkan, proses demokrasi seringkali dipahami sekedar ritual proses pergantian pemimpin melalui pemilu. Oleh karena itu, tidak heran kalau kita melihat dalam bidang ekonomi, agama, sosial, dan budaya seringkali tidak dianggap sebagai bagian yang harus diikutsertakan dalam demokrasi.

Proses demokrasi yang seharusnya diiringi dengan transparansi, ternyata masih dijadikan ajang berlaku “bebas tak terbatas” oleh kalangan-kalangan tertentu. Doktrin agama yang seharusnya berada di samping demokrasi, ternyata tidak selalu menjadi “kawan”, akan tetapi sebaliknya, menjadi “lawan”.

Berbagai permasalahan yang muncul dalam proses demokratisasi di Indonesia setidaknya menjadi pelajaran berharga bagi para pemikir dan pelaku politik di Indonesia. Bagaimanapun, sesuatu yang baik, belum tentu menjadi baik apabila diterapkan pada wilayah yang belum dapat menerima dan menerapkan kebaikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Muhajir, *Masyarakat Equilibrium*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, "Politik: Masa Transisi Harus Segera Diakhiri", dalam *Jurnal Inovasi*, No. 2 Th. XIII 2004.
- Manan, Munafrizal, *Gerakan Rakyat Melawan Elite*, Yogyakarta: Resist Book, 2005.
- Masoed, Mohtar, *Negara Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1991.
- Suaedy, Ahmad (dkk.), *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Suhelmi, Ahmad *Pemikiran Politik Barat Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Sulistyo, Hermawan dan A. Kadar, *Uang dan Kekuasaan dalam Pemilu 1999*, Jakarta: KIPP Indonesia, 2000.
- Thompson, Dennis F., *Etika Politik Pejabat Negara*, Jakarta: Yayasan Obor, 2002.
- Ubaidillah, A. dkk, *Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Vrofsky, Melvin J, "Prinsip-Prinsip Demokrasi" dalam *Demokrasi*, Jakarta: Office of International Information Program, 2001.

Media Massa dan Internet:

Kompas, 7 September 2006.

www.mirifica.net/wmview. Diakses pada 1 Februari 2007.

UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi ANALISIS Jurnal Studi Keislaman IAIN Raden Intan Lampung menghaturkan penghargaan dan terima kasih kepada:

Mitra Bestari:

1. Prof. Dr. Syaripudin Basyar , M.Ag (Guru Besar Pemikiran Politik Islam STAIN Jurai Siwo Metro).
2. Dr. Nur Ikhwan, MA (Pengamat Gerakan Radikal Islam, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).
3. Wan Jamaluddin, Ph.D. (Direktur Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung)
4. Dr. Fakhriati, MA (Peneliti Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Jakarta).
5. Dr. Zamzam Afandi, MA (Pakar Timur Tengah, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).

atas kesediaan dan ketulusannya menelaah, mengoreksi, dan menilai naskah ANALISIS Volume XI, Nomor 1, Juni 2011.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	ṣā'	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Ka dan Ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zāi	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge

ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāw	w	We
ه	hā'	h	Ha
ء	hamzah	`	Apostrof
ي	yā'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

عدّة	ditulis	‘iddah
------	---------	--------

3. Ta>Marbutah

- a. Bila mati ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرمة الأولياء	ditulis	karimah al-auliya>
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta> marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakatul fitri
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

ِ	kasrah	ditulis	i
َ	fathah	ditulis	a
ُ	dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

fathah + alif	ditulis	A/a>
جاهلية	ditulis	jahiliyah
fathah + ya` mati	ditulis	A/a
يسعى	ditulis	yas'a>
kasrah + ya` mati	ditulis	i>
كريم	ditulis	karim
dammah + wawu mati	ditulis	u>
فروض	ditulis	furuḍ

6. Vokal rangkap

fathah + ya` mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ال). Namun dalam transliterasi ini, kata sandang dibedakan menjadi:

- Kata Sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan transliterasi yang telah disebutkan, sesuai dengan bunyinya.

الحيوان	ditulis	al-hayawan
البقرة	ditulis	al-baqarah

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, huruf (ال) diganti dengan huruf yang sama yang mengikuti kata sandang tersebut.

الذبح	ditulis	az-zabḥ
النحر	ditulis	an-nahḥ